

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran APBD antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD). Pemerintah daerah mengajukan RKA-SKPD dan rencana kerja SKPD ke DPRD untuk dibahas dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD. APBD khususnya anggaran belanja yang telah disahkan diharapkan dapat digunakan oleh SKPD-SKPD secara optimal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pada anggaran belanja terdapat bagian belanja untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan rekening belanja barang/jasa dan belanja modal. Belanja tersebut direncanakan dan dimuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dibuat oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran setiap tahun. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D) setiap tahunnya

membelanjakan minimal 40 persen untuk pengadaan barang/jasa [Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2011]. Anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah yang cukup besar sebaiknya harus diserap dalam periode tahun anggaran secara merata agar pertumbuhan perekonomian dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan pencapaian *output* [PMK No. 249/PMK.02/2011 pasal 4 ayat (2)]. Penyerapan

anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penjelasan atas penggunaan keuangan yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah. Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa menjadi kajian yang penting karena setiap belanja pemerintah harus dipertanggungjawabkan untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada umumnya sangat lambat dalam realisasinya dan seringkali menumpuk diakhir tahun, hal ini terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi baik administrasi maupun teknis. Proses lelang yang lambat, terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan pegawai untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dan sulitnya mendapatkan pegawai bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa (Laporan Tim Warta BPKP 2011). Percepatan penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa patut menjadi perhatian pemerintah demi tercapainya pelayanan publik sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Manfaat percepatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan lebih cepat, pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, dan juga *Net Present Value* dari APBD yang lebih baik (UKP4, 2012).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran, diantaranya dengan melakukan perubahan yang keempat

terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata, distribusi penyerapan anggaran yang proporsional sepanjang tahun belum terwujud dan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa masih rendah. Berbagai resep pemerintah untuk mempercepat penggunaan anggaran sepertinya belum manjur, jangankan menjadi lokomotif ekonomi, penyerapan dana belanja pemerintah selama kuartal I-2015 tetap saja masih lemah (Kontan 7 April 2015). Menurut Kuntoro dalam Rmol.co (2012) mengungkapkan bahwa realisasi belanja selama semester I tahun 2012 menunjukkan hanya pos belanja pegawai yang lancar, sedangkan belanja barang dan modal masih rendah.

Penelitian tentang penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa masih relatif baru di sektor publik. Penelitian yang telah banyak dilakukan cenderung mengkaji tentang penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja (Hopwood 1972), partisipasi penganggaran terhadap kinerja (Jermias dan Setiawan 2008), pengaruh struktur organisasi terhadap penganggaran (King, Clarkson dan Wallance 2010). Penelitian dalam negeri kebanyakan mengkaji penyerapan belanja secara umum diantaranya: keterlambatan penyerapan anggaran belanja (Herriyanto 2012), terkonsentrasinya penyerapan anggaran belanja diakhir tahun anggaran (Kuswoyo 2011), penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran (Sukadi 2012), dan rendahnya penyerapan realisasi anggaran (Murtini 2009).

Penelitian ini menguji fenomena yang terjadi di sektor publik atau pemerintahan seperti komitmen manajemen (Babakus, Yavas, Karatepe dan Avci 2003; Juliani 2014), perencanaan (Kuswoyo 2011; Herriyanto 2012; Sukadi 2012), kompetensi sumber daya manusia (Herriyanto 2012; Qolbi, Djasuli dan Harwida 2012), penerapan monitoring dan evaluasi (Kamal 2011) dan lingkungan eksternal (Thai 2001) akan memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Komitmen manajemen memengaruhi kinerja organisasi (Babakus *et al* 2003), kesinergian dengan faktor pengetahuan peraturan dan lingkungan birokrasi memengaruhi terlaksananya penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa (Juliani 2014). Perencanaan berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran (Kuswoyo 2011; Herriyanto 2012; Sukadi 2012). Sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang kurang kompeten dapat memengaruhi penyerapan anggaran (Herriyanto 2012). Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan menerapkan SPIP, para pelaku pengadaan akan dapat mengambil peran penting dalam upaya penyerapan anggaran sesuai jadwalnya dan jika *step by step* SPIP kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan benar maka SPIP Instansi Pemerintahan nyata urgensinya dipentas birokrasi Indonesia (Kamal 2011). Sistem pengadaan publik mampu untuk mencapai kebijakan pengadaan/tujuan dipengaruhi oleh lingkungannya, dan pada suatu saat mempengaruhi lingkungannya (Thai 2001). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Juliani (2014) yang menguji pengaruh komitmen manajemen, pengetahuan peraturan, lingkungan birokrasi dan pengawasan keluaran terhadap

penyerapan anggaran pemerintah daerah terkait proses pengadaan barang/jasa, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa di pemerintahan khususnya pemerintah daerah.